

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Budiardjo Miriam (1998), *partisipasi dan partai politik: sebuah bunga rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo Miriam (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.
- Rosyada Dede, dkk (2005) *Memilih dan dipilih*. Jakarta: pradnya paramita.
- Jliansyah Elvi (2007), *Pilkada Penyelenggaraan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung :Mandar Maju.
- Nugroho Heru (2002). *uang, rentenir dan utang piutang di Jawa*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Guba dan Lincoln 2008. *Teknik pengumpulan data kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya
- Lexy, Moleong. 2004. *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*, Bandung Remaja Rosdakarya
- Moleong, lexy J. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2009 . Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Milles, Mattew B., dan A. Michael Huberman. *AnalisisData Kualitatif*. 2007. Jakarta:UiPrees
- RSoejono, H.Abdurrahman. 2005. *MetodePenelitian suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta PT. Rineka cipta rajawali Pers.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu (JakartaTimur: Sinar Grafika Offset, 2017*
- Idris dan Ade Irfan Santosa, “*implementasi pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu: hasil program kampung pengawasan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 2019)*”

**Jurnal:**

- Muhammad Hoiru Nail (2018), “*kualifikasi politik uang dan strategi hukum dan kultural atas pencegahan politik uang dalam pemilihan umum*”, Jurnal Yuridis, Vol. V, No, 2, ISSN : 2476-9029 , hlm 246-247.
- Dedi irawan (2015), “*politik uang dalam pemilu legeslatif tahun2014*” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. III, No 1, ISSN : 324-536, hlm 142-143.
- Eka Januar (2017),”*dinamika money politics pada pemilukada Aceh*”, jurnal Politik, Vol V, No 3, ISSN : 526-437, hlm 54-55.
- Frenki, M.Si (2015). “*asas-asas dan fungsi dalam pelaksanaan pemilu di imdonesia*”, Jurnal Demokrasi, Vol 2, No 1, ISSN 214-924, hlm 18-19.
- Metria Shela dan Sutiyo (2018), “*peran Bawaslu dalam mencegah money politic dalam pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018*”, Jurnal Wacana Publik, Vol. XII, No, 2, ISSN: 213-336, hlm 76-78.
- Is Susanto (2018), “*analisis hukum islam dan hukum positif terhadap money politic pada pemilu*”, Jurnal Hukum, Vol, XV, no, 2, ISSN : 361-489, hlm 165.
- Muhammad Ja’far (2018), “*Eksistensi dan integritas Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu*”, Madani Legar Review, Vol, II, no, 1, ISSN : 221-681, hlm, 60.
- Nurkinan (2018), “*peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak anggota legeeslatif dan pilpres tahun 2019*” Jurnal Politikom Indonesia, Vol,III, no.1, ISSN :693-749, hlm 34-35.
- Tauchid Noor (2019), “*peran komisi pemilihan umum meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum*”, Jurnal Konstitusi, Vol,II, No.1, ISSN :298-873,hlm 52-53.

**Skripsi**

- Lailan, fajri. (2005). *Peran panwaslu dalam pengawasan pemilihan umum 2004 (studi kasus di Kabupaten Aceh Utara), Lhokseumawe, FISIP Universitas Malikussaleh.*
- Mahzir (2013). *pemilukada dan demokrasi lokal: peran panwaslu dalam pengawasan pemilukada 2012 (studi kasus kota lkokseumawe. Lhokseumawe, FISIP Universitas Malikussaleh.*
- Nabila Amrie Afina (2020) “*peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang di Desa anti politik uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah*”. Universitas IAIN PURWOKARTO Fakultas Syariah.

Ihsan Kamil (2017) *“Ihsan Kamil dengan judul skripsi “peran panitia pengawas pemilu dalam upaya meminimalisasi konflik Horizontal antar peserta pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.*

Mat Khoiruddin (2017) *“tinjauan hukum islam terhadap peran dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam pengawasn pemilihan WaliKota Bandar Lampung Tahun 2015. Lampung;Universitas Islam Negeri Raden Intan fakultas ilmu Hukum Syariah.*

Farid Muhajir (2017) *““Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak”*.jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum.

#### **Internet:**

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.2017. Aceh Singkil dalam angka. Hal 5.

<http://www.acehsingkilkab.go.id/>diakses pada 09 juli 2019.

Ali Sidik, *“peran badan pengawasan pemilu dalam penegakan hukum pemilu (studitentang interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pemilu pada pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung)”*, Tesis, Bandar Lampung: Universitas Lampung, tahun 2016.

Achmad Maricha Yulifianto, *“Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Bawaslu menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”*, skripsi, Surabaya: Universitas Negri Sunan Ampel, 2019, hlm, 56

Ebin Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999, dalam [www.unieraac.id/pub/1/1.](http://www.unieraac.id/pub/1/1/) diakses 5 april 2019.

[http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu\(20april2016\)](http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu(20april2016))

#### **Undang-Undang:**

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 pasal 38 ayat 2 huruf (a) –(e)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017